KEBEBASAN BERPIKIR MENURUT JOHN STUART MILL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam (S. Fil. I)

Oleh

FATHUL MAHALLY
NIM: 00510310

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN AQIDAH FILSAFAT

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2004

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN
Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1043/2004

Skripsi dengan judul : *Kebebasan Berpikir Menurut John Stuart Mill*

Diajukan oleh :

1. Nama : Fathul Mahally
2. NIM : 00510310
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal : 2 Desember 2004 dengan nilai : B+ (83.5) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang
Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150228609

Sekretaris Sidang
Drs. Rahmat Fajri
NIP. 150275041

Pembimbing/merangkap Penguji
Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum
NIP. 150088748

Pembantu Pembimbing
Shofiyullah MZ, M. Ag
NIP. 150299964

Penguji I
Drs. Suddin, M.Hum
NIP. 150239744

Penguji II
Fahruddin Faiz, M. Ag
NIP. 150298986

Yogyakarta, 2 Desember 2004
DEKAN
Drs. H. M. Fahmi, M.Hum
NIP. 150088748

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Berakhlaklah seperti akhlak Nabi Saw. Dan para shiddiqin tidak akan sempurna kecuali dengan resep yang terdiri dari tiga hal yaitu ilmu, sikap, dan perbuatan. Ilmu akan mendorong sikap dan sikap akan mendorong perbuatan"
(Imam Al Ghazali)

"Ilmu merupakan syarat sahnya ucapan dan perbuatan, karena ilmu memperbaiki niat dan amal"
(Imam Bukhari)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :
Bapak dan Ibu yang tetap tabah dan tegar dalam mendidik ananda
Alm. Mas Fadholy, Mbak Ida sekeluarga, Fuad, Fahrur dan Nurul tercinta
Tanty atas dorongan semangatnya
Kampus putih Almamaterku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Masalah kebebasan berpikir merupakan masalah yang selalu aktual dan universal untuk dibahas. Kebebasan berpikir Mill ini dilatar belakangi adanya suatu pertarungan antara kekuasaan dan kebebasan di Inggris pada waktu itu di mana kekuasaan selalu mempresentasikan kepentingan yang bertentangan dengan kehendak rakyat sehingga menyebabkan kebebasan yang di dalamnya termasuk kebebasan berpikir sangat dibatasi. Selain dari latar belakang itu, pemikiran Mill dipengaruhi secara langsung oleh aliran utilitarian yang diikutinya dimana manfaat digunakan sebagai dasar tujuan aliran tersebut. Pemikiran Mill ini juga berhubungan dengan etika politik karena kebebasan berpikir merupakan tema pokok etika politik empat abad terakhir yang membahas tentang batas-batas kebebasan berpikir yang berhadapan dengan kekuasaan dan adanya suatu jaminan atau pengakuan Negara akan hak tersebut. Maka Mill sebagai orang yang sangat perhatian dengan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional berusaha untuk memperjuangkan hak kebebasan berpikir melalui pemikirannya tersebut.

Dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan suatu permasalahan itu menjadi dua: *Pertama*, mengapa kebebasan berpikir itu harus dihargai dan dilindungi?, *kedua*, bagaimana konsep kebebasan berpikir menurut John Stuart Mill bila ditinjau dari perspektif etika politik? Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui dasar-dasar kebebasan berpikir itu harus dihargai dan dilindungi serta untuk mengetahui dan memahami pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan berpikir dalam aspek etika politik. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur yang menjadikan obyek bahasannya pemikiran Mill tentang kebebasan berpikir yang ditinjau dari aspek etika politik. Sumber-sumber data yang digunakan adalah sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan tersebut dan kemudian diolah melalui tehnik deskripsi, interpretasi dan analisa.

Dari penelitian ini dapat di hasilkan jawaban untuk menjawab rumusan masalah diatas bahwa kebebasan berpikir menurut John Stuart Mill itu harus dilindungi dan dihargai karena hal itu menjawab kebutuhan manusia yang paling penting. Ketidakmampuan menyatakan pikiran atau pendapat apapun alasannya merupakan pemotongan dan pengurangan kemampuan manusia untuk berpikir. Tetapi bagi Mill kebebasan berpikir yang merupakan hak dasar individu itu mempunyai batas-batas bila hal itu sudah menyangkut individu lain dalam suatu komunitas masyarakat. Maka Mill sebagai seorang aliran utilitarian menggunakan prinsip manfaat dalam membatasi kebebasan berpikir itu yaitu terdapat satu uji sederhana validitas kontrol sosial dari kekuasaan pemerintah terhadap tindakan individu yang termasuk didalamnya kebebasan berpikir adalah satu-satunya tujuan dimana kekuasaan yang sah dapat dijalankan secara sah terhadap anggota masyarakat yang beradab agar tidak merugikan individu lain.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Atas ungkapan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyeleseikan skripsi ini, walau dalam waktu yang relatif lama. Dengan seleseinya penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menempuh jenjang studi S 1, setidaknya penulis telah terlepas dari satu tugas dan kewajiban akademik serta telah dapat menunaikan salah satu amanat dari kedua orang tua penulis. Dengan demikian penulis telah mencapai satu target yang dicita-citakan. Semoga ilmu ini dapat dijadikan bekal penulis untuk melanjutkan perjalanan hidup yang masih panjang dan membentang dihadapannya.

Maka dalam kesempatan inilah, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyeleseikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak. Drs. H. Muzairi, MA dan Bapak. Drs. Abdul Basir Solissa, M. Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum dan Bapak Shofiyullah MZ, M. Ag yang telah membimbing, memberi arahan, petunjuk dan saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan arahan untuk lebih memahami arti hidup. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau berdua karena selama ini penulis kurang berbhakti kepadanya. Dan juga kakak-kakakku serta adikku tersayang atas dorongan-dorongan dan perhatiannya.
6. Tanty, atas dorongan semangatnya sehingga penulis tetap tegar dalam menyeleseikan skripsi ini.
7. Rahman dan Usman, atas bantuan komputer dan print-nya. Kalian berdua sahabat yang tiada duanya.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di "Aqidah Filsafat 2", angkatan 2000 atas kebersamaannya, serta teman-teman di "WISMA SARJANA" yang dengan keadaan susah dan senang selalu tegar dalam menghadapi masalah. Walaupun Asrama kita bubar tetapi silturahmi kita tetap langgeng. Semoga Allah Yang Maha Rahman Dan Maha Rahim memberikan imbalan yang setara atas budi baik semua pihak yang telah membantu terseleseinya skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 November 2004

Penulis

Fathul Mahally

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Dan Kegunaaan Penelitian 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Metode Penelitian 12

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II. BIOGRAFI JOHN STUART MILL

A. Riwayat Hidup 16

B. Karya-Karyanya 19

C. Latar Belakang Pemikiran 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III. KEBEBASAN BERPIKIR DAN ETIKA POLITIK

A. Pengertian Kebebasan Berpikir 27

1. Pengertian Kebebasan 27

a. Kesempurnaan Eksistensi 28

b. Kebebasan Kehendak 30

c. Kebebasan Dalam Arti Sosio-Politik 33

2. Pengertian Berpikir 38

3. Pengertian Kebebasan Berpikir 39

B. Tujuan dan Dasar Kebebasan Berpikir 41

C. Pengertian Etika Politik 43

D. Prinsip-Prinsip Legitimasi Kekuasaan 49

1. Legitimasi Kekuasaan Dalam Pandangan Politik 51

2. Legitimasi Kekuasaan Dalam Pandangan Hukum 54

3. Legitimasi Kekuasaan Dalam Pandangan Negara 59

BAB IV. KEBEBASAN BERPIKIR *"VIS A VIS"* KEKUASAAN

A. Kebebasan Berpikir Menurut John Stuart Mill 63

B. Batasan Kebebasan Berpikir dan Kekuasaan 75

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran-Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kebebasan berpikir merupakan suatu masalah yang selalu aktual untuk dibicarakan, bahkan itu merupakan persoalan universal yang akan selalu muncul dalam kehidupan umat manusia. Membicarakan kebebasan berpikir itu sudah barang tentu akan berkaitan dengan tingkah laku manusia dan perbuatan manusia, karena kebebasan berpikir selalu dikaitkan dengan tindakannya dalam memilih dan mengambil keputusan dari kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi dan konsekuensi terhadap tanggungjawabnya, sebab dengan inilah manusia dapat disebut bebas atau tidak bebas, karena kebebasan berarti kemampuan berpikir dan mengambil keputusannya.[1]

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengalaman dari negara totaliter telah membuktikan suatu kenyataan bahwa kebebasan berdiskusi, kritik dan perkumpulan-perkumpulan sukarela sangat dibatasi, sebaliknya di negara demokrasi masih mendorong kebebasan berdiskusi, kritik dan perkumpulan-perkumpulan sukarela.[2] Tetapi dalam realitasnya, demokrasi yang diagung-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Raymond Aron, *Kebebasan dan Martabat manusia*, Terj. Rahayu S. Hidayat *(et al.)*, (Jakarta: Yayasan Obor indonesia, 1993), hlm. 54.

[2] John Dewey, *Budaya dan Kebebasan : Ketegangan Antara Kebebasan individu dan aksi kolektif*, Terj. A. Rahman Zainudin, (Jakarta: Rineka Cipta, Maret 1990), hlm. 84

agungkan sebagai suatu sistem yang ideal dan menghargai kebebasan-kebebasan itu masih banyak melakukan pembungkaman-pembungkaman terhadap kebebasan berpikir yang itu merupakan suatu pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Misalnya, informasi yang dikonsumsi pemerintah tidak disosialisasikan kepada rakyat dan rakyat hanya disuruh mendengar, tetapi tidak boleh mengeluarkan pikiran dan pendapat serta kritik. Dengan adanya pembatasan seperti itu maka otomatis daya tahu manusia itu dipersempit, karena daya tahu itu kerap kali dicapai manusia dengan berpikir. Berpikir dan tahu itu merupakan hak asasi manusia, karena timbul dari kemanusiannya, dan dengan berpikir itu manusia berharap mencapai suatu kebenaran.[3] Walaupun dalam hal ini tidak mudah untuk mencapai kebenaran yang mutlak dan pasti, tetapi paling tidak dengan berpikir itu akan mendekati suatu kebenaran. .

Kebebasan berpikir yang dapat mendekati suatu kebenaran itu juga secara tidak langsung dapat dipengaruhi dari luar bahkan dapat dikacaukan dan ditiadakan dengan melalui tekanan fisik dan psikis.[4] Tekanan fisik itu hanya mengenai kejasmanian seseorang, tetapi dapat memungkinkan manusia untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat. Misalnya, pencekalan tidak boleh ke luar negeri bagi seorang politisi yang dianggap oposisi terhadap pemerintahan yang sah. Sedangkan tekanan psikis itu merupakan tekanan yang merusak kepribadian dari dalam seperti pemikiran, sikap hatinya dan sumber keputusannya. Misalnya, seorang politisi yang dicekoki obat-obat terlarang oleh pemerintah agar

---

[3] Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, (Jakarta: Rineka Cipta, Maret 1990), hlm. 74

[4] Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, Pustaka Filsafat, 1993), hlm. 24-25

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemampuan berpikir dan berpendapat untuk mengkritisi pemerintah dapat dilenyapkan. Kedua tekanan itu harus dinilai jahat dan buruk, tetapi untuk tekanan psikis itu lebih kotor dan jahat karena dapat memperlemah ketekadan batinnya seseorang.[5] Jadi secara jelas kedua tekanan itu memang tidak dapat dibenarkan tanpa terkecuali.

Dengan demikian kebebasan berpikir atau pengungkapan pendapat itu tidak boleh ditekan dan dibungkam dengan bentuk apapun. Jaminan kebebasan berpikir agar tidak ditekan itu memang paling identik dengan demokrasi karena sudah sejak demokrasi zaman Yunani kuno, orang mendefinisikan kebebasan berpikir atau berpendapat sebagai wacana yang menjadi sarana utama dan eksklusif dalam tindakan politik.[6] Sehingga agar hal itu dapat direalisasikan maka kebebasan berpikir atau berpendapat itu harus dihargai dan dilindungi.

Maka untuk menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar omong kosong belaka dan dapat menjadi suatu hal yang nyata, manusia dituntut untuk menghormati kebebasan pribadi, kebebasan untuk mengungkapkan diri dan berdiskusi, kebebasan berserikat dan berkumpul.[7] Dengan adanya penghormatan terhadap kebebasan tersebut, maka manusia tidak akan terbawa kepada suatu tingkat konformitas tanpa pikiran serta manusia akan secara aktif dan kreatif mampu mengeluarkan pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat kepada suatu lembaga-lembaga politik dalam pemerintahan.

---

[5] *Ibid.* hlm. 39-40.
[6] Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas, 2003).

[7] Raymond Aron, *op. cit.* hlm. 94-95.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menanggapi permasalahan tersebut, maka John Stuart Mill filosof kenamaan di Inggris memunculkan pemikiran tentang kebebasan berpikir.. Pemikiran Mill tentang kebebasan tersebut secara langsung ada suatu pengaruh dari nuansa pencerahan atau *Aufklarung* sebagai latar belakang sosiologis, dimana masa itu pencerahan sebagai *self emansipation of men* dari otoritas agama dan gereja untuk membangun kebebasan berpikir, sehingga dari sisi epistemologi berdampak pada sikap kritis terhadap agama dan gereja serta menghargai individu yang mempunyai martabat dan di bidang sosial politik muncul gejala sekularisasi. Pengaruh lainnya yaitu aliran Utillitarian. Aliran itu berpendapat bahwa tindakan manusia itu didasarkan atas suatu manfaatnya. Manfaatnya dalam hal ini merupakan kebahagiaan, kesenangan dan menghindari sakit atau penderitaan. Mill sendiri dalam aliran itu mengembangkan dari pelopor aliran tersebut yaitu Jeremy Bentham. Tetapi perbedaan keduanya yang paling mendasar adalah ukurannya. Kalau Mill ukurannya kualitatif dimana kesenangan itu bukanlah satu-satunya motif tindakan dan sikap seseorang, sedangkan Bentham kesenangan itu merupakan motif satu-satunya. Dalam hal cakupan kesenangan, Mill lebih umum daripada Benthams, dimana Mill lebih memandang kebahagiaan umum dan tidak semata-mata memandang kepada kepentingan dirinya sendiri saja seperti yang dikemukakan Benthams.[8] Selain dari kedua pengaruh tersebut pemikiran Mill juga di pengaruhi oleh pertarungan antara kebebasan dan kekuasaan di sejarah Inggris yang antagonis, dimana kekuasaan identik dengan pemerintah yang

---

[8] Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat,* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 171.

kepentingannya bertentangan dengan kepentingan rakyat, sehingga kebebasan rakyat sangat di batasi.

Berawal dari kebahagiaan umum inilah, Mill lebih cocok kepada sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dianggap paling baik dan menghargai kebahagiaan umum serta pendapat umum. Pemerintahan yang berbentuk demokrasi inilah yang dianggap paling baik dalam memberikan kesempatan setiap warga negara untuk mengungkapkan pemikiran, suara, pendapat dan bebas melakukan suatu diskusi atau perkumpulan, serta pemerintahan hasil dari pendapat-pendapat umum dan merupakan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Dengan sistem pemerintahan demokrasi ini diharapkan membuat individu mengembangkan pemikirannya serta memajukan sifat aktif yang mengarah kepada kepentingan umum. Pemerintahan demokratis yang mengarah kepada kepentingan umum itu adalah pemerintahan yang disertai segenap orang, tetapi mengingat dalam suatu negara itu wilayahnya besar dan luar serta tidak segenap anggota masyarakat dapat berperan serta dalam membicarakan atau memperhatikan masalah bersama. Oleh sebab itu pemerintahan sistem demokrasi perwakilan yang mungkin dapat direalisasikan. Pemerintahan perwakilan yang merupakan hasil dari pendapat umum itu memang memungkinkan terdapat suara terbanyak atau mayoritas berhadapan dengan minoritas, tetapi Mill dalam pemikirannya itu memberikan kesempatan bagi minoritas untuk berpikir dan menyumbangkan pendapatnya, sehingga dengan hal itu Mill lebih cocok ke sistem perwakilan seimbang, dimana golongan minoritas

tetap ada wakilnya di parlemen.[9] Diberinya kesempatan minoritas untuk mengeluarkan pemikiran dan pendapatnya itu bagi Mill agar tidak ada pemberantasan terhadap prakarsa individu dalam lapangan pikiran, karena pemberantasan tersebut akan sangat merugikan bagi manusia. Maka dianjurkannya prakarsa individu itu harus dihormati dan dihargai sebagai kemampuan individu untuk aktif dan kreatif dalam berpikir.

Maka kebebasan berpikir menurut John Stuart Mill ini merupakan tema pokok etika politik empat abad terakhir yang sangat aktual untuk dikaji karena kebebasan berpikir merupakan permasalahan etika politik yang membahas tentang batas-batas kebebasan berpikir yang berhadapan dengan kekuasaan dan atas dasar tuntutan apa hak-hak tersebut dijamin dan diakui oleh kekuasaan negara. Etika politik sebagai filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.[10] Fungsi etika politik adalah mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab, sedangkan tugasnya yaitu menjalankan pembahasan masalah-masalah ideologis dapat secara obyektif dilaksanakan. Etika politik memberikan patokan-patokan dan pegangan yang normatif bagi mereka yang menilai suatu tatanan berdasarkan penghargaan terhadap harkat martabat manusia.

Pokok pembahasan etika politik adalah legitimasi kekuasaan, dimana hal itu sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif. Kekuasaan disini adalah kekuasaan negara yang mempunyai wewenang dan otoritas. Wewenang dan otoritas adalah " kekuasaan yang di lembagakan " yaitu kekuasaan tidak hanya *de*

---

[9] *Ibid.* hlm. 174.

[10] Frans Magnis suseno, *ETIKA POLITIK, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 2.

facto menguasai, melainkan juga berhak menguasai.[11] Obyek legitimasi wewenang itu ada dua yaitu legitimasi materi wewenang dan legitimasi subyek wewenang. Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya. Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma menjadi dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik: dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif dan dalam kekuasaan (eksekutif) negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil kekuasaan, sedangkan legitimasi subyek kekuasaan mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat untuk memegang kekuasaan negara.[12] Maka legitimasi kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan hukum karena hukum sebagai tatanan yang normatif untuk menjalankan suatu kekuasaan negara dan hukum pun tidak akan berarti kalau negara tidak ada.

Etika politik menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas), disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral).[13] Dengan ketiga hal tersebut kekuasaan secara etis sah. Kekuasaan itu harus di bawah hukum karena wewenang kekuasaan harus di batasi hukum agar wewenang itu sah.

---

[11] Miriam Budiarjo (ed), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 14.

[12] Frans Magnis Suseno, *op. cit.* hlm. 54-55.

[13] *Ibid.* hlm. 39.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebebasan berpikir ini merupakan visi Mill tentang masyarakat liberal, dimana ekspresi bebas dari berbagai perspektif di andaikan untuk menawarkan kesempatan terbaik demi mencapai kebijakan yang mempromosikan kepentingan umum.[14] Bagi Mill ekspresi bebas yang dalam hal ini kebebasan berpikir bila diberantas atau dibungkam merupakan suatu kejahatan karena tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Dasar kebebasan berpikir itu adalah di satu pihak bahwa lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat tidak mempunyai wewenang di bidang pikiran, melainkan sejauh mereka memang mempunyai wewenang, wewenang itu terbatas pada praktek kehidupan anggota-anggotanya.[15] Hal itu berarti ketika individu sudah masuk dalam satu kesatuan masyarakat dan menjadi anggota dalam masyarakat, maka kebebasan berpikir yang tidak boleh dibatasi wewenang dalam hal pikiran itu akhirnya harus tunduk kepada wewenang yang sah.

Kaum utilitarian – termasuk John Stuart Mill – sangat perhatian dengan pemerintahan yang konstitusional.[16] Dengan hal tersebut kebebasan berpikir itu memang harus berhadapan dengan kekuasaan dan hukum negara, sehingga sejauh mana kebebasan berpikir dapat dilaksanakan bila berhadapan dengan kekuasaan dan hukum dalam perspektif etika politik serta apa batas-batas kebebasan berpikir itulah yang hendak dikaji dan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut memang yang selalu aktual untuk dikaji dan dibahas. Bagaimanapun juga pemikiran Mill tersebut paling tidak menunjukkan suatu kemajuan dari para pemikir-pemikir sebelumnya.

---

[14] Dennis F. Thomson, *Etika Politik Pejabat Negara*, Terj. Benyamin Nolan, (ed 1), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 74.

[15] Frans Magnis Suseno, *op, cit.*, 150.

[16] Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern,* Terj. Ahmad Baedlowi & Imam Baehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2002),hlm. 455.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka peneliti bermaksud mengkaji dan meneliti pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan berpikir dalam aspek etika politik. Maka dengan deskripsi tentang pemikiran tersebut nanti dapat dicari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa kebebasan berpikir itu harus dihargai dan dilindungi ?.
2. Bagaimana konsep kebebasan berpikir menurut John Stuart Mill dalam aspek etika politik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian tentang obyek dan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan dan berguna untuk:

1. Mengetahui dan memahami mengapa kebebasan berpikir itu harus dihargai dan dilindungi oleh semua pihak.
2. Mengetahui dan memahami pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan berpikir dalam aspek etika politik.

D. Kajian Pustaka

Sepengetahuan peneliti, konsep kebebasan berpikir menurut John Stuart Mill dalam aspek etika politik belum pernah diteliti atau dikaji dalam lingkungan kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun secara umum pembahasan tentang pemikiran tersebut juga belum pernah dibahas secara mendetail, hanya skripsi dari Saudari Hariana Kusuma Wati yang membahas tentang etika menurut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

John Stuart Mill,[17] yang dalam hal ini aliran Utillitariannya. Pembahasan yang sekilas saja dan belum mendetail ini dapat kita lihat dibukunya Deliar Noer yang berjudul "Pemikiran Politik di Negeri Barat".[18] Di dalam buku ini ada bab yang membahas tentang kebebasan dan kekuasaan serta kebebasan berpikir dan berdiskusi menurut John Stuart Mill.

Sumber data primer dalam penyusunan skripsi ini yaitu buku "ON LIBERTY" (perihal kebebasan) karya dari John Stuart Mill yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Alex Lanur terbitan Yayasan Obor Indonesia.[19] Dalam pembahasan buku ini ada salah satu bab yang membahas tentang kebebasan berpikir dan inilah yang dicoba untuk dikaji dalam skripsi ini. Konsep kebebasan berpikir dalam buku ini pada intinya harus dilindungi dan dihargai karena itu merupakan hak dasar manusia sebagai tanda kemartabatan manusia yang mempunyai akal yang rasional.

Dan juga buku John Stuart Mill yang berjudul Utilitarian, On Liberty and Representative Government.[20] Buku ini membahas tentang etika utilitarian, perihal kebebasan dan pemerintahan yang representatif menurut John Stuart Mill.

Sedangkan sumber sekunder yang lain yaitu "Etika Politik"[21] karangan Frans Magnis Suseno yang menjelaskan bahwa manusia alamiah itu bebas, merdeka. Ia hidup dengan polos, bebas dari segala wewenang orang lain serta

---

[17] Skripsi Hariana Kusuma Wati, *Etika Menurut John Stuart Mill*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2000

[18] Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat.* (Bandung: Mizan, 1998)

[19] John Stuart Mill, *On Liberty -Perihal Kebebasan-*, Terj. Alex Lanur, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996)

[20] John Stuart Mill, *Utillitarian, On Liberty & Representative Government*, (E.P Dutton And Company, Inc, 1951)

[21] Frans Magnis Suseno, *ETIKA POLITIK, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

memiliki kedudukan yang sama. Keadaan alamiah itu hancur setelah manusia membentuk kesatuan masyarakat untuk menjamin kebutuhannya, sehingga manusia yang tadinya bebas untuk memenuhi kepentingan sendiri berubah menjadi kepentingan umum.

Buku ini menjelaskan etika politik sebagai filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Fungsi etika politik ini dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, sedangkan tugas etika politik adalah subsidier: membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhotbahi para politikus, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.[22]. Sumbangan etika politik terhadap pembangunan masyarakat justrulah bahwa komitmen satu-satunya adalah pencarian kebenaran, entah kognitif, entah normatif, dengan tidak peduli apakah pihak-pihak yang berkuasa menganggapnya tepat atau tidak. Maka etika politik sebagai kritik ideologi tidak berada di tingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara. Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata.[23]

---

[22] *Ibid.* hlm. 2-3.

[23] *Ibid.* hlm. 6-7.

Sumber yang lain adalah buku "etika politik dan kekuasaan"[24] karangan Haryatmoko yang di dalamnya ada salah satu pembahasan tentang kebebasan berpendapat dan kekerasan dalam suatu sistem demokrasi.

Selain itu juga buku "Filsafat Politik" Kajian Historis dari zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern.[25] Karangan Henry J. Schmandt di mana didalamnya dibahas pemikiran politik dari filsuf zaman Yunani kuno sampai zaman modern termasuk didalamnya pemikiran politik John Stuart Mill tentang kebebasan manusia, batas-batas kebebasan individu dan gagasannya tentang pemerintah yang representatif.

Selain sumber di atas, ada juga sumber-sumber lain yang dirasa relevan dengan judul skripsi ini, sehingga dapat memperluas pembahasan pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan berpikir itu.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka murni (Library Research) dengan sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel yang terkait permasalahan itu dengan melalui metode dokumentasi. Dengan data-data yang telah di dokumentisir dari sumber-sumber tersebut baik primer maupun sekunder, peneliti akan mencoba memahami dan menggali gagasan dari pemikiran John Stuart Mill tersebut.

---

[24] Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan,*(Jakarta: Kompas, 2003)

[25] Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Medern*, Terj. Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Untuk menjadikan agar penelitian tersebut tidak kabur dan tanpa struktur yang jelas, tanpa sistematika pembahasan atau terhindar dari penggunaan sistematika dan metode yang kacau diperlukan aturan atau metode ilmiah tertentu.[26] Maka kegiatan penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tehnik Pengumpulan Data

   Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dari obyek penelitian ini yaitu buku "On Liberty" dan "Utilitarian, On Liberty and Representative Government" maupun data sekunder yang terkait dengan judul tersebut, dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari buku-buku, artikel-artikel, encyclopedia dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan tersebut.[27]

2. Tehnik Pengolahan Data

   Langkah pertama pertama dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran kebebasan berpikir menurut John Stuart Mill secara jelas dan terperinci dari karya Mill sendiri dan dari karya para ahli yang membahas tentang Mill sehingga nanti didapatkan pokok-pokok pemikiran Mill tentang dasar-dasar serta prinsip-prinsip kebebasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[26] Anton Baker – Achmad Charis Z, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 11

[27] *Ibid.*, hlm. 63

berpikir. Langkah ini merupakan metode deskripsi yaitu uraian teratur mengenai seluruh konsep tokoh.[28]

Tentu saja untuk mendapatkan deskripsi pemikiran Mill secara jelas dan terperinci perlu dilakukan berbagai upaya antara lain melihat sisi internal Mill seperti latar belakang kehidupan dan pendidikannya. Sedangkan sisi eksternal meliputi keadaan sosial, politik dan budaya pada waktu itu sehingga mempengaruhi pemikirannya serta pengaruh filosof lain dalam pemikirannya.

Langkah kedua dalam penelitian ini adalah memahami dan menafsirkan sehingga nanti didapat pemikiran Mill tentang kebebasan berpikir dalam konteks etika politik yaitu kebebasan berpikir *"vis a vis"* kekuasaan serta batas-batas kebebasan berpikir dan kekuasaan. Langkah ini merupakan metode interpretatif yaitu karya tokoh diselami untuk menangkap arti dan nuansa yang dimaksud tokoh secara khas.[29]

Langkah ketiga adalah memahami makna-makna dan istilah-istilah yang dikandung serta pernyataan-pernyataan pemikiran Mill ini yang berhubungan dengan etika politik sehingga nanti didapatkan suatu kejelasan daripadanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] Louis O. Kattsof, *Pengantar Filsafat*, Terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana,1989), hlm. 22

[29] Anton Baker - Achmad Charis Z., *op, cit.*, hlm. 63.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman, penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dari awal akan dipaparkan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian dirumuskan dengan jelas lalu dijelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian kemudian dilanjutkan tinjauan pustaka. Pada akhir bab pertama diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan biografi John Stuart Mill yang meliputi riwayat hidup, karya serta latar belakang pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan berpikir.

Bab ketiga secara deskriptif mengemukakan kebebasan berpikir dan etika politik yang terdiri dari pengertian kebebasan berpikir, serta tujuan dan dasar penghargaan kebebasan berpikir. Sedangkan pembahasan selanjutnya tentang etika politik terdiri dari pengertian etika politik dan prinsip-prinsip legitimasi kekuasaan yaitu legitimasi kekuasaan dalam pandangan politik, hukum dan negara.

Bab keempat, yang menjadi fokus penulisan skripsi ini yaitu pembahasan kebebasan berpikir *"vis a vis"* kekuasaan yang sah serta kebebasan berpikir menurut John Stuart Mill kemudian dilanjutkan pembahasan batasan kebebasan berpikir dan kekuasaan.

Bab kelima adalah bab terakhir dari rangkaian penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebebasan berpikir itu harus dihargai dan dilindungi karena hal itu menjawab kebutuhan manusia yang paling penting yaitu hak setiap individu untuk membentuk pendapatnya sendiri tentang segala segi kehidupan, untuk memberikan penilaian terhadap pola kehidupan masyarakat dan tatanan hukum, untuk menyetujui atau tidak menyetujui pandangan-pandangan, nilai-nilai dan norma-norma moral dalam suatu masyarakat. Apabila kebebasan berpikir itu dibungkam maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia sebagai mahkluk yang berakal budi. Bagi Mill kebebasan berpikir yang didalamnya termasuk prakarsa dari segala hal-hal yang bijaksana dari manusia yang mesti datang dari individu untuk membentuk suatu pendapat yang bertujuan untuk mencapai suatu kebenaran. Sedangkan dasar menghargai kebebasan berpikir itu menurut Mill adalah jika seluruh umat manusia minus satu orang yang tidak sependapat, maka umat manusia itu tidak lebih benar karena membungkam orang yang satu itu daripada karena membungkam umat manusia, jika dia mempunyai kekuasaan. Sehingga bagi Mill pemerintahan yang paling sah dan baik pun tidak boleh menggunakan paksaan untuk membungkam kebebasan berpikir atau prakarsa individu daripada pemerintahan yang paling buruk.

2. Kebebasan berpikir itu merupakan permasalahan etika politik empat abad terakhir di mana pokok permasalahannya tentang batas-batas kebebasan berpikir dan batas-batas negara atau kekuasaan menjamin hak-hak tersebut. Kebebasan berpikir menurut John Stuart Mill dalam aspek etika politik ini mencakup didalamnya kebebasan berbicara atau berpendapat dan menulis. Kebebasan tersebut dilatarbelakangi masa pencerahan dan pertentangan antara kekuasaan dan kebebasan pada masa itu dimana kekuasaaan yaitu pemerintah selalu mempresentasikan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dengan kekuasaan seperti itu berdampak kebebasan berpikir sangat dibatasi. Sedangkan bagi Mill batas-batas kebebasan berpikir yang berhadapan dengan kekuasaan yang sah dinyatakan dalam prinsip bahwa terdapat satu uji kontrol sederhana untuk menentukan validitas kontrol sosial dari pemerintah terhadap individu yang termasuk didalamnya kebebasan berpikir yaitu satu-satunya tujuan dimana kekuasaan negara bisa dijalankan secara sah terhadap setiap anggota masyarakat yang beradab diatas kehendak setiap anggotanya adalah untuk mencegah bahaya yang merugikan orang lain. Dari prinsip tersebut kebebasan menurut Mill tidak bertentangan dengan kekuasaan karena kebebasan ini membutuhkan kekuasaan untuk mengimplementasikan hak-haknya dan kekuasaan dapat melakukan restriksi apabila kebebasan berpikir itu mempunyai kecenderungan positif yang jahat dan merugikan individu lain demi terciptanya suatu kesejahteraan, kebahagiaan, keteraturan

umum dan kedamaian. Dan hal ini sesuai dengan semangat utilitarian yang berdasarkan manfaat sebagai tujuannya untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, keteraturan umum dan kedamaian. Tapi sebaliknya kebebasan berpikir juga dapat digunakan sebagai sarana kontrol yang efektif terhadap kekuasaan yang dijalankan dengan sewenang-wenang melalui pengungkapan pendapat dan kritik baik lisan maupun tulisan. Mill juga menambahkan pembatasan itu juga hanya berlaku bagi individu yang sudah matang dan dewasa karena dianggap mampu berpikir yang rasional serta berpengetahuan.

B. Saran-Saran

1. Kebebasan berpikir menurut Mill yang didasarkan pada prinsip utilitarian itu dapat dijadikan dasar untuk membangun suasana yang kritis terhadap kekuasaan serta adanya penghargaan terhadap pendapat individu.
2. Kebebasan berpikir menurut Mill ini dapat digunakan sebagai sarana yang efektif bagi sebuah usaha perubahan yang selalu dialektik untuk pencapaian tingkat kebenaran yang selalu berkembang dari zaman ke zaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Aron, Raymond. *Kebebasan dan Martabat Manusia*, Terj. Rahayu S. Hidayat...(et al), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Baut. Paul S dan Benny Harman K, *Kompilasi Deklarasi HAM*, Jakarta: YLBHI,1998.

Bertens, K. *Etika,* Jakarta: Gramedia, 2000.

_____, *Perspektif Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Briton, Karl. John Stuart Mill, *An Introduction To The Life and Theaching Of A Great Pionner Of Modern Philosophy and Logic*, Melbourne Enz.., PenguinsBooks,1953.

Budiarjo, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

_____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Charis Ahmad, Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Press,1995.

Dewey, John. *Budaya dan Kebebasan: Ketegangan Antara Kebebasan Individu dan Aksi Kolektif*, Terj. A. Rahman Zaidun, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Dister OFM, Nico Syukur. *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Edwards, Paul (ed). *The Encyclopedia Of Philosophy. Vol. 5*, New York: The Mac Millan Company and The Free Press, 1967.

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Ushuluudin, 2002.

Hardiatmoko. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Tira Pustaka, 1990.

Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: PT Kompas, 2003.

Hawkins, Joyce M, *Kamus Dwi Bahasa, Oxford-Erlangga, Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Terj. A. Remy Rahardian, Jakarta: Erlangga, 1999.

Kattsoff, Louis O. *Pengantar Fisafat*, Terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Leahy, Louis. *Manusia Sebuah Misteri*, Sintesa Filosofis Tentang Makhluk Paradoksal, Jakarta: Gramedia, 1984.

_____, *Masalah Kebebasan*, Jakarta: STF Driyakara, 1981.

Liputo, Yulian. *Kamus Filsafat*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.

Mill, John Stuart. *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, Terj. Alex Lanur, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

_____, *Utilitarian, On Liberty and Representative Government*, New York: EP. Dutton and Company, London: JM. Dent and Sons, Inc, 1951.

Magnis Suseno, Frans. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

_____, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 2003.

_____, (Penyusun Utama), *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia, 1993.

_____, *Kuasa dan Moral: Percikan-Percikan Refleksi Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Noer, Deliar. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1998.

Poedjawiyatna. *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Salam, Burhanudin. *Logika Formal, Filsafat Berpikir*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Salim, Peter. *Advanced English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sargent, Lyman Tower. *Ideologi Politik Kontemporer*, Terj. Sahat Simamora, Jakarta: PT Bina Aksara, 1986.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Terj. Imam Baehaqi dan Ahmad Baedlowi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Siregar, Edi S. (Terj.) *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Soehino. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Solomon, Robert C. *Etika Suatu Pengantar*, Terj. Andre Karo Karo, Jakarta: Erlangga, 1987.

Thompson, Dennis F. *Etika Politik Pejabat Negara*, Terj. Benyamin Nolan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Titus, Harold H. (dkk). *Living Issues In Philosophy*, Terj. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama	: Fathul Mahally
Tempat, Tgl Lahir	: Boyolali, 27 Juli 1981
Alamat	: Tumang RT 02/XIII, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah
Nama Ayah	: H. MS. Zuhri
Nama Ibu	: Hj. Churriyah
Riwayat Pendidikan	: 1. Lulus SD Tumang I, Tahun 1994
	2. Lulus SMPN 1 Cepogo, Tahun 1997
	3. Lulus MAN 1 Boyolali, Tahun 2000
	4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA